

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT DEPENDENSI MANFAAT
LANGSUNG HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN
DI DESA MATTIROWALIE KEC. TANETE RIAJA
KAB. BARRU SULAWESI SELATAN**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**DEWI NAJMIAH
M011201045**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TINGKAT DEPENDENSI MANFAAT LANGSUNG HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA MATTIROWALIE KEC. TANETE RIAJA KAB. BARRU SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

DEWI NAJMIAH
M011201045

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 16 Juli 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

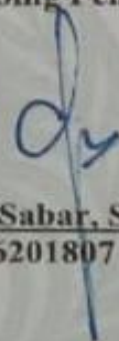
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

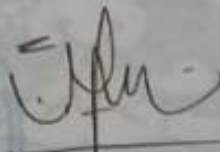


Prof. Dr. Ir. Svamsu Alam, M.S
NIP. 19590420198503 1 003

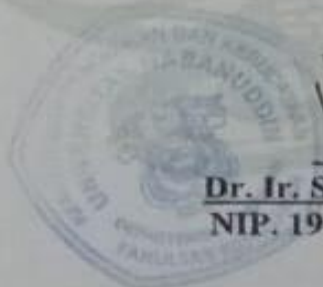


Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut, M.P. IPM
NIP. 19850916201807 4 001

Ketua Program Studi



Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P.
NIP. 19680410199512 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Najmiah

NIM : M011201045

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya berjudul:

**"ANALISIS TINGKAT DEPENDENSI MANFAAT LANGSUNG HASIL
HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA MATTIROWALIE
KEC. TANETE RIAJA KAB. BARRU SULAWESI SELATAN"**

Adalah karya tulisan Saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang Saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya Saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juli 2024

Yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'SERI BUKU BUNGA'. The serial number 'D8DD2ALX253005592' is visible at the bottom of the note.

Dewi Najmiah

ABSTRAK

Dewi Najmiah (M011201045). Analisis Tingkat Dependensi Pendapatan Masyarakat terhadap Kawasan Hutan Kemasyarakatan Mattirowaleng di Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja Kab. Barru Sulawesi Selatan.

Tingkat dependensi masyarakat terhadap hutan khususnya masyarakat sekitar hutan akan terus meningkat yang disebabkan bertambahnya populasi penduduk. Kondisi tersebut menjadi suatu masalah dalam masyarakat sekitar hutan, sebab bertambahnya populasi penduduk desa dapat menimbulkan konflik kepentingan dan pemanfaatan sumberdaya yang melampaui daya dukung kawasan. Pemerintah membentuk program perhutanan sosial yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk mencegah konflik tersebut, salah satunya berada di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru. Penelitian ini bertujuan mengitung pendapatan total serta tingkat dependensi masyarakat terhadap Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattirowalie Kab. Barru Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan (biaya produksi, penerimaan dan pendapatan), analisis kontribusi serta analisis tingkat dependensi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pendapatan rata-rata yang diperoleh petani adalah Rp65.853.090/tahun dengan tingkat dependensi terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan tergolong rendah yaitu berada pada interval 25%. Tingkat dependensi masyarakat pada hutan yang terukur dalam penelitian ini cenderung rendah karena hanya memperhitungkan manfaat ekonomi langsung, sehingga mengabaikan kontribusi penting jasa ekosistem hutan yang tidak ternilai.

Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan, Dependensi, Pendapatan, Kelompok Tani Hutan

ABSTRACT

Dewi Najmiah (M011201045). Analysis of the Level of Community Income Dependency on the Mattirodeceng Community Forest Area in Mattirowalie Village, District. Tanete Riaja District. Barru, South Sulawesi.

The level of community dependency on forests, especially communities around forests, will continue to increase due to the increase in population. This condition becomes a problem in communities around the forest, because the increasing village population can lead to conflicts of interest and resource utilization that exceeds the area's carrying capacity. The government established a social forestry program, namely Community Forestry (HKm) to prevent this conflict, one of which is in Mattirowalie Village, Barru Regency. This research aims to calculate total income and the level of community dependency on Community Forests in Mattirowalie Village, District. Barru, South Sulawesi. The data obtained was analyzed using income analysis (production costs, receipts and income), contribution analysis and dependency level analysis. Based on the results of this research, it is known that the average income obtained by farmers is IDR 65,853,090/year with the level of dependency on the Community Forest area being relatively low, namely at an interval of 25%. The level of community dependency on forests measured in this study tends to be low because it only takes into account direct economic benefits, thereby ignoring the important contribution of invaluable forest ecosystem services.

Keywords: Community Forests, Dependencies, Income, Forest Farmer Groups

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Dependensi Masyarakat terhadap Kawasan Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja Kab. Barru Sulawesi Selatan", sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta **Jumaeni** yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa, memberikan semangat dan selalu memberikan dukungan serta kasih sayang. Terima kasih juga untuk Ibu **Muliani** dan Bapak **Rais** yang telah merawat, membesarkan serta memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S** dan Ibu **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut, M.P, IPM** selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan serta arahan dan saran dari awal perancangan penelitian hingga penyelesaian tugas akhir ini.
2. Bapak **Prof. Dr. forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut, M.Si** dan Bapak **Dr. Ir. Budiaman, M.P** selaku dosen penguji yang bersedia memberikan banyak kritik, saran dan masukan demi kesempurnaan tugas akhir ini.
3. Bapak **Dr. Ir. Ridwan, M.SE** selaku dosen penasehat akademik, terima kasih atas segala nasehat dan bimbingannya selama ini sejak awal mulai menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
4. Saudara penulis (**Khairul**) dan seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
5. Teman yang selalu ada membantu selama proses penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini serta mendukung dan memotivasi penulis selama ini, **Maryam**.

6. Teman-teman yang telah membantu, mendukung dan memotivasi penulis selama ini, **Oktavia Dwiana Lewa, Rinni, Khusnul Khatima, Musdalipa, Mutmainna, Nurzamzam Arafah, Susi Rahmadani, Riswandi, Haspian, Muh. Idris, Hafid Fajar** dan **Muhammad Fattah**.
7. Teman-teman mahasiswa **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan angkatan 2020** atas kebersamaan, dukungan dan kerjasamanya.
8. Teman-teman **IMPERIUM 2020** atas kebersamaannya selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini memiliki manfaat bagi para pembaca, atas keterbatasan ilmu pengetahuan penulis maka diperlukan kritik dan sarab dari pembaca untuk menyempurnakan segala kekeliruan dari penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu.

Makassar, 16 Juli 2024

Dewi Najmiah

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Perhutanan Sosial	3
2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)	5
2.3 Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan.....	6
2.4 Dependensi Masyarakat terhadap Kawasan Hutan	7
2.5 Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	8
III. METODOLOGI PENELITIAN	10
3.1 Waktu dan Tempat.....	10
3.2 Alat dan Bahan	10
3.3 Jenis Data.....	11
3.4 Metode Pelaksanaan Penelitian	11
3.4.1 Penentuan Populasi dan Sampel	11
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	12
3.5 Ruang Lingkup Penelitian	12
3.6 Metode Analisis Data	13
3.6.1 Analisis Biaya	13
3.6.2 Analisis Pendapatan	13
3.6.3 Analisis Penerimaan	13

3.6.4 Analisis Kontribusi.....	14
3.6.5 Analisis Dependensi Masyarakat terhadap Hutan.....	14
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	15
4.2 Identifikasi Karakteristik Responden	15
4.2.1 Tingkat Pendidikan	15
4.2.2 Tingkat Usia	16
4.2.3 Tanggungan Keluarga	16
4.2.4 Jenis Pekerjaan	17
4.3 Pemanfaatan Sumberdaya dalam Kawasan Hutan	17
4.4 Pemanfaatan Sumberdaya dalam Kawasan HKM.....	18
4.4.1 Pemanfaatan Lahan untuk Produksi Kacang	18
4.4.2 Pemanfaatan Tanaman Aren untuk Produksi Gula Merah	19
4.4.3 Pemanfaatan Tanaman Aren untuk Produksi Nira/Tuak	21
4.5 Pemanfaatan Sumberdaya Luar Kawasan HKM.....	22
4.5.1 Pemanfaatan Lahan untuk Produksi Kacang	22
4.5.2 Pemanfaatan Lahan untuk Produksi Padi	23
4.5.3 Budidaya Ternak Sapi.....	24
4.6 Tingkat Dependensi Masyarakat terhadap HKm.....	25
V. PENUTUP.....	28
5.1 Kesimpulan.....	28
5.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Tingkat dependensi dari komponen kontribusi	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta Sebaran Responden di Desa Mattirowalie.....	10
Gambar 2.	Pendapatan produksi kacang pada areal HKm.....	19
Gambar 3.	Pendapatan produksi gula merah.....	20
Gambar 4.	Pendapatan produksi nira/tuak	21
Gambar 5.	Pendapatan produksi kacang	23
Gambar 6.	Pendapatan produksi padi.....	24
Gambar 7.	Pendapatan budidaya ternak.....	25
Gambar 8.	Diagram persentase sumber pendapatan masyarakat	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Panduan wawancara penelitian.....	35
Lampiran 2.	Dokumentasi Penelitian.....	38
Lampiran 3.	SK Penetapan HKm di Desa Mattirowalie	40
Lampiran 4.	Identitas Responden.....	51
Lampiran 5.	Klasifikasi Karakteristik Responden	53
Lampiran 6.	Biaya Variabel Produksi Kacang pada Areal HKm	54
Lampiran 7.	Biaya Tetap Produksi Kacang pada Areal HKm.....	57
Lampiran 8.	Biaya Produksi Kacang pada Areal HKm	60
Lampiran 9.	Penerimaan Produksi Kacang pada Areal HKm.....	61
Lampiran 10.	Pendapatan Produksi Kacang pada Areal HKm	63
Lampiran 11.	Biaya Variabel Produksi Gula Merah.....	64
Lampiran 12.	Biaya Tetap Produksi Gula Merah	66
Lampiran 13.	Biaya Produksi Gula Merah	69
Lampiran 14.	Penerimaan Produksi Gula Merah	71
Lampiran 15.	Pendapatan Produksi Gula Merah	72
Lampiran 16.	Biaya Variabel Produksi Nira/Tuak	74
Lampiran 17.	Biaya Tetap Produksi Nira/Tuak	76
Lampiran 18.	Biaya Produksi Nira/Tuak	77
Lampiran 19.	Penerimaan Produksi Nira/Tuak.....	79
Lampiran 20.	Pendapatan Produksi Nira/Tuak	80
Lampiran 21.	Biaya Variabel Produksi Kacang Luar Kawasan HKm.....	82
Lampiran 22.	Biaya Tetap Produksi Kacang Luar Kawasan HKm	86
Lampiran 23.	Biaya Produksi Kacang Luar Kawasan HKm	90
Lampiran 24.	Penerimaan Produksi Kacang Luar Kawasan HKm.....	91
Lampiran 25.	Pendapatan Produksi Kacang Luar Kawasan HKm	93
Lampiran 26.	Biaya Variabel Produksi Padi.....	94
Lampiran 27.	Biaya Tetap Produksi Padi	97
Lampiran 28.	Biaya Produksi Padi	100

Lampiran 29. Penerimaan Produksi Padi	101
Lampiran 30. Pendapatan Produksi Padi	103
Lampiran 31. Biaya Variabel Budidaya Ternak	104
Lampiran 32. Biaya Tetap Budidaya Ternak	106
Lampiran 33. Biaya Budidaya Ternak	108
Lampiran 34. Penerimaan Budidaya Ternak.....	109
Lampiran 35. Pendapatan Budidaya Ternak	110
Lampiran 36. Sumber Pendapatan Masyarakat.....	112

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan masyarakat semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat mulai memanfaatkan hutan untuk mencari kehidupan (Agustiningrum *et al.*, 2023). Sekitar 48,8 juta masyarakat tinggal di kawasan hutan negara, dan 40,9% masyarakat tinggal di sekitarnya, dengan 12% diantaranya bergantung pada kawasan hutan untuk hidup (Murti, 2018). Hal tersebut mengakibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan memiliki hubungan yang sangat erat dengan sumber daya alam khususnya hutan. Hutan berperan penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat dalam berbagai aspek baik dalam aspek sosial dan ekonomi (Pasaribu dan Sunaryanto, 2023).

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat dependensi masyarakat terhadap hutan khususnya masyarakat sekitar hutan akan terus meningkat yang disebabkan bertambahnya populasi penduduk (Haryani dan Rijanta, 2019). Kondisi tersebut menjadi suatu masalah dalam masyarakat sekitar hutan, sebab bertambahnya populasi penduduk desa dapat menimbulkan konflik kepentingan dan pemanfaatan sumberdaya yang melampaui daya dukung kawasan (Yusran dan Nurdin, 2017).

Untuk mencegah konflik tersebut, pemerintah membentuk program perhutanan sosial dengan salah satu jenisnya yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan masyarakat sekitar hutan (Martapani *et al.*, 2021). Salah satu program perhutanan sosial yang saat ini banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar adalah Hutan Kemasyarakatan yang ada di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang ditetapkan pada tahun 2022 dengan luas \pm 150 hektar dijelaskan dalam SK.4496/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2022. Keberadaan HKm ini dimanfaatkan dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Masyarakat desa memandang hutan sebagai sumber pendapatan (Yusran dan Nurdin, 2017). Pendapatan mengacu pada hasil seseorang yang mendapat imbalan dari usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Dedi *et al.*,

2021). Hutan memberi manfaat langsung sebagai penyedia kayu, hewan, dan hasil hutan lainnya (Silalahi *et al.*, 2019). Selain itu masyarakat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang termasuk rotan, rempah-rempah, buah-buahan, jamur, dan obat-obatan (Sabar *et al.*, 2023).

Masyarakat di Desa Mattirowalie sangat bergantung pada sumberdaya air yang bersumber dari kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas pendapatan masyarakat bersumber dari hasil pertanian. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan, masyarakat melakukan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak terbatas pada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan saja, melainkan seluruh elemen masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan pada hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tingkat dependensi masyarakat terhadap hutan khususnya sekitar kawasan hutan kemasyarakatan di Desa Mattirowalie, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan. Penelitian ini hanya menganalisis tingkat dependensi masyarakat pada manfaat langsung hasil hutan non-kayu yang memiliki nilai ekonomi, sehingga mengabaikan kontribusi penting kawasan hutan dalam mengatur iklim, menjaga kualitas air, mencegah erosi, serta melindungi keanekaragaman hayati.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menghitung pendapatan total masyarakat yang memanfaatkan hutan di Desa Mattirowalie, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis tingkat dependensi masyarakat terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattirowalie, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan tambahan informasi mengenai analisis dependensi masyarakat terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sehingga dapat dijadikan rujukan oleh peneliti atau mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Social forestry dapat diartikan cara untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta mengurangi efek buruk dari aktivitas masyarakat lokal di hutan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal atau hukum adat di kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat (Laksemi *et al.*, 2019). Peraturan Menteri LHK Nomor 83 tahun 2016 menetapkan konsep perhutanan sosial sebagai program pemerintah, "Perhutanan Sosial". Tujuan dari pengelolaan hutan sosial ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat adat sambil tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan, serta mempertahankan dinamika sosial dan budaya (Amri *et al.*, 2020).

Sejak tahun 2016, Perhutanan Sosial (PS) menjadi salah satu program strategi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan memberikan akses kelola secara legal kepada masyarakat asli dan pendatang. Kemitraan kehutanan menjadi salah satu usaha pemerintah dalam menerapkan skema perhutanan sosial agar masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan hutan (Sinurat *et al.*, 2023).

Diharapkan untuk mengurangi kemiskinan dan konflik terkait hak atas lahan, pemerintah menekankan perhutanan sosial sebagai prioritas utama. Perhutanan sosial sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup orang miskin, mendukung pertumbuhan wilayah, dan menjaga kelangsungan sumber daya hutan, termasuk dalam konteks adaptasi iklim. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan pedesaan baik di dalam maupun di sekitar hutan dengan tujuan menjamin hak masyarakat desa untuk mengelola sumber daya alam (SDA) pada skala lokal, yang akan membantu peningkatan kesejahteraan (Murti *et al.*, 2018). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adalah salah satu tujuan utama program Perhutanan Sosial (Amri *et al.*, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 menyatakan bahwa perhutanan sosial terbagi atas:

1. Hutan Desa (HD) merupakan hutan negara yang dikelola oleh pemerintah desa untuk dimanfaatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.
4. Hutan Adat (HA) merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
5. Kemitraan Kehutanan (KK) merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang usaha industri hasil hutan.

Dalam pemanfaatan hutan, lima skema digunakan: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Hutan Kemitraan. Dengan menerapkan opsi skema ini, diharapkan akan muncul lapangan kerja baru, menurunkan pengangguran dan meningkatkan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi (Amri *et al.*, 2020). Diharapkan penerapan kebijakan perhutanan sosial akan mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan, penyediaan sumber ekonomi baru, peningkatan nilai tambah dari produksi hasil hutan, pengembangan unit usaha baru berbasis masyarakat, peningkatan investasi komunitas berbasis lahan, peningkatan daya saing dan daya beli masyarakat, dan peningkatan ekspor. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan hutan lestari, mengurangi konflik tenurial dan mengurangi pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja baru di desa dari rantai bisnis produksi perhutanan (Murti *et al.*, 2018).

2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan merupakan hutan milik negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setelah merasakan nilai ekonomi yang diperoleh dari hutan, pemanfaatan izin HKm dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan seperti wisata alam atau air. Pemanfaatan jasa lingkungan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat sekitarnya serta mendorong minat masyarakat dalam konservasi hutan (Butarbutar, 2021).

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil. Tujuan pemanfaatan HKm adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Asgar dan Mareta, 2019). Program ini ditetapkan Menteri Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 tahun 2007 yang kemudian di revisi melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 tahun 2010. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur segala sesuatu tentang bentuk pelaksanaan program HKm. HKm memberikan keuntungan yang signifikan bagi masyarakat hutan dan pemerintah (Asgar dan Mareta, 2019).

Tujuan Departemen Kehutanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan melalui pemanfaatan sumber daya hutan sambil mempertahankan fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi hutan (Ariza *et al.*, 2023). Dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan menyatakan bahwa HKm merupakan hutan yang keberadaannya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Izin dan penetapan area kerja di hutan tidak dapat menjamin kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat (Ariza *et al.*, 2023). Program Hutan Kemasyarakatan dapat memiliki efek serta hasil yang berbeda di tempat yang berbeda (Andani *et al.*, 2019).

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan HKm dapat memperkuat kelembagaan masyarakat. Setiap program yang ada di kelompok tani HKm dapat

dilaksanakan jika ada kelembagaan di dalamnya. Partisipasi aktif dalam kelembagaan oleh masyarakat pengelola lahan HKm dapat berdampak baik maupun buruk tergantung pada bagaimana mereka bertindak. Kondisi tutupan lahan HKm di suatu wilayah sebelum dan sesudah program HKm dapat mengalami perubahan, sehingga keberhasilan masyarakat dalam pengelolaan lahan HKm juga dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat (Asgar dan Mareta, 2019).

Untuk menciptakan dan mewujudkan konsep pengelolaan hutan secara lestari perlu melibatkan masyarakat secara luas, terutama mereka yang tinggal di sekitar hutan. Proses melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dikenal sebagai konsep partisipasi dan sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan menempatkan masyarakat sebagai pengelola di tingkat tapak (Witno *et al.*, 2020).

2.3 Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia karena selain memberikan oksigen, hutan juga mengatur tata air, mencegah bencana, dan melindungi berbagai flora dan fauna. Hasil hutan sangat penting bagi suatu negara karena dapat mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor dengan mengatur tata air oleh tanaman dan tumbuhan. Selain itu, hasil hutan dapat menjadi sumber devisa negara melalui ekspor hasil hutan, baik kayu maupun non kayu, dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat (Utami *et al.*, 2020).

Secara umum, masyarakat yang terletak di sekitar hutan memiliki tingkat ekonomi dan wawasan yang lebih rendah. Konflik berulang kali disebabkan oleh akses masyarakat terhadap hutan yang kurang dan aktivitas ilegal (Murti, 2018). Masyarakat merupakan elemen terdepan serta terdekat untuk menjaga kelestarian hutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat menjadi pilar untuk terciptanya pengelolaan hutan secara lestari (Wahyuni *et al.*, 2024).

Hak masyarakat untuk memiliki dan menggunakan lahan seringkali tidak diakui, dan aturannya sendiri sering kali berlawanan atau tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa akses ke lahan di hutan telah lama menjadi masalah (Murti, 2018). Masyarakat yang hidup di sekitar hutan dapat berubah jika mereka tahu tentang pentingnya kelestarian hutan, yang dapat memengaruhi kesejahteraan kehidupan masyarakat sekitar hutan (Wahyuni *et al.*, 2024). Untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari mereka, masyarakat di dalam dan di sekitar hutan hujan tropis bergantung pada pohon atau produk hutan. Keterbatasan akses lahan ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan dan merambah wilayah hutan, seringkali tanpa melewati proses perizinan yang ketat (Laksemi *et al.*, 2019).

Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan, namun sayangnya mereka hidup dalam kondisi miskin dan sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk menyambung kehidupan, ditambah dengan pengetahuan yang tergolong rendah terkait dengan pengelolaan hutan secara lestari lestari (Dewi, 2018). Hal ini yang dapat memicu terjadi kerusakan hutan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan memperbaiki kondisi sumber daya alam tempat masyarakat tersebut menyambung hidupnya, maka diperlukan pendekatan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat (Toha *et al.*, 2023).

2.4 Dependensi Masyarakat terhadap Kawasan Hutan

Sumber daya hutan biasanya digunakan untuk tujuan pribadi, bangunan umum desa, dan bahan baku untuk kerajinan masyarakat. Masyarakat melihat hutan sebagai tempat untuk berbisnis dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan di sekitar hutan, pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan sangat penting. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan biasanya sangat bergantung pada hasil hutan (Haryani dan Rijanta, 2019).

Menurut Permen No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan hutan merupakan aktivitas untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keberadaannya. Menjaga dan mengelola kelestarian hutan adalah tanggung jawab masyarakat setempat, yang merupakan bagian penting dari proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Masyarakat akan membentuk lembaga atau kelompok untuk mengelola hutan, dan

masyarakat akan memiliki kendali langsung atas kelompok tersebut (Mujaffar, 2020). Masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan bukan hanya ikut serta, tetapi juga bertanggung jawab langsung atas prosesnya (Haryani dan Rijanta, 2019).

Kehidupan ekonomi masyarakat adalah bagian dari masalah keberlanjutan rusaknya hutan. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat sekitar hutan, maka kerusakan hutan akibat aktivitas masyarakat kawasan hutan akan ikut berkurang serta dapat dihindari. Karena masyarakat bergantung pada hutan di sekitarnya untuk hidup, rusaknya hutan dikaitkan dengan kehidupan ekonomi yang rendah (Maimunah *et al.*, 2018).

Dependensi masyarakat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan sangat berkontribusi secara langsung bagi pengembangan serta pelestarian hutan, khususnya hutan kemasyarakatan. Hal tersebut akan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat akan pentingnya keberadaan dari hutan, sesuai dengan peran hutan dalam berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat akan hutan. Karena, pada dasarnya pengelolaan hutan bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar hutan (Bakrie dan Luhut, 2021).

2.5 Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus segera ditangani seperti beberapa masalah sosial ekonomi, termasuk rendahnya pendapatan, lapangan kerja yang terbatas, rendahnya kesehatan, peningkatan penduduk miskin, sulitnya mendapatkan informasi dan keterbatasan modal ekonomi masyarakat. Dampak dari rendahnya pendapatan masyarakat yaitu semakin rusaknya sumber daya hutan, masyarakat semakin sulit mengembangkan potensi diri, sulitnya memenuhi standar kebutuhan hingga akhirnya masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam program pembangunan (Mulyadin *et al.*, 2016)

Penghasilan adalah istilah yang mengacu pada jumlah uang yang diterima seseorang atau sekelompok keluarga dari pendapatan usaha selama satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pendapatan dari pekerjaan sampingan dianggap sebagai penghasilan tambahan, penghasilan yang tidak berasal dari kegiatan utama. Pada umumnya, pemanfaatan hasil olahan hutan,

baik kayu maupun bukan kayu, menyumbang pendapatan masyarakat di sekitar hutan. Semakin besar dependensi masyarakat pada hasil hutan, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari hasil hutan (Dedi *et al.*, 2021).

Tingkat pendapatan rumah tangga petani dapat menunjukkan keadaan ekonomi rumah tangga. Tinggi atau rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga (Alfrida dan Trisna, 2018). Pada umumnya, pendapatan masyarakat yang berbasis lahan berasal dari pengelolaan lahan pertanian di lahan perkebunan campuran milik negara, lahan pertanian milik sendiri dan usaha perdagangan (warung, perawat, guru, dan lain-lain) (Mulyadin *et al.*, 2016).